

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penumpukan Pencairan Dana APBN Pada Akhir Tahun Anggaran Di KPPN Bandar Lampung 2021

Hani Safitri¹, Eka Sariningsih², Apip Alansori³

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen

Universitas Malahayati Bandar Lampung

Email: hanisafitri133@gmail.com, ekasariningsih@yahoo.com, apipalansori95@gmail.com

Abstract

This study aims to empirically examine the factors that influence the accumulation of disbursement of APBN funds at the end of the fiscal year in work units in the payment area of the Bandar Lampung State Treasury Service Office (KPPN). The type of research used is descriptive quantitative. The sampling method used was random sampling with a total sample of 74 who were officials involved in the fund disbursement process in the Bandar Lampung KPPN payment area. The independent variables used are Budget Planning, Budget Execution, Procurement of Goods and Services, Resources and Internal Factors. The dependent variable used is the Accumulation of APBN Funds Disbursement. The data used in this research is primary data. Retrieval tool in the form of questionnaires distributed to 74 respondents. The data analysis method used is Multiple Linear Regression. The results of this study indicate that the variables Budget Execution, and Procurement of Goods and Services, have a significant effect on the Accumulation of APBN Funds Disbursement, while the variables Budget Planning, Human Resources and Internal Factors have no significant effect on the Accumulation of APBN Funds disbursement of work units in the KPPN payment area Bandar Lampung.

Keywords: Budget Planning, Budget Execution, Procurement of Goods/Services, Human Resources and Internal Factors.

1. Latar Belakang

Pencairan Dana adalah proses penggunaan anggaran yang ada pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dilakukan dengan proses transfer dana dari Bank Operasional I (BO I) kepada Rekening Pihak Penerima sesuai apa yang tertera pada SP2D. Pengaturan terkait proses pencairan dana saat ini diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2007, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.05/2010. Proses pencairan dana dilakukan dengan tepat jumlah, tepat penerima, dan tepat waktu untuk dapat menciptakan efektivitas penyaluran dana APBN.

Permasalahan pada pencairan dana anggaran di Indonesia sesuai pernyataan (Mentri Keuangan 2017) penyerapan anggaran masih mempunyai pola penyerapan yang tidak ideal, yaitu cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran, di masa realisasi anggaran rendah sampai dengan triwulan ketiga namun meningkat tajam triwulan keempat.

Penelitian ini dilakukan di KPPN Bandar Lampung karena berdasarkan data realisasi anggaran tahun 2021 menunjukan bahwa penyerapan anggaran pada triwulan ke-IV mengalami pelonjakan yang signifikan dibandingkan dari triwulan I, II, dan III. Berikut data realisasi anggaran KPPN Bandar Lampung Tahun 2021.

Tabel 1 Pagu Dan Realisasi Belanja Satker 2021

Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Presentasi	Prentase	Prentase	Prentase
Pegawai	31.50%	18.98%	23.68%	25.24%
Barang	24.74%	12.52%	23.98%	32.88%
Modal	15.95%	24.69%	16.89%	34.39%
Beban Bunga	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-
Ghibah	-	-	-	-

Uraian	Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Presentasi	Prentase	Prentase	Prentase
Bansos	42.26%	0.00%	0.05%	57.67%
Lain-lain	-	-	-	-
Transfer	31.01%	15.74%	14.71%	36.40%
Total	25.51%	18.16%	19.40%	32.62%

Sumber : KPPN Bandar Lampung

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada triwulan pertama penyerapan anggaran sebesar 25.51%, kemudian pada triwulan ke II penyerapan anggaran turun menjadi 18.16%, setelah itu dapat melihat pada triwulan ke III mengalami kenaikan sebesar 19.40%, dan terlihat cukup signifikan penyerapan anggaran pada triwulan terakhir sebesar 32.62%. Hal ini menjelaskan bahwa penyerapan anggaran di akhir tahun atau triwulan IV mengalami penumpukan pencairan dana APBN.

Penelitian ini replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Kenamon & Sara, 2021) dengan variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, sumber daya manusia, pengadaan barang/jasa terhadap penumpukan pencairan dana APBN. (Trisna dan dkk, 2019) dengan variabel perencanaan anggaran, sumberdaya manusia, pengadaan barang/jasa terhadap keterlambatan penyerapan anggaran diwilayah pembayaran KPPN Tolitoli tahun anggaran 2019. (Puluala, 2021) dengan variabel Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Sumber daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga). Perbedaan dengan peneliti sebelumnya terletak pada penambahan variabel internal, dan lokasi penelitian yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandar Lampung, yang berdasarkan pemahaman penulis belum ditemukan penelitian serupa pada lokasi penelitian tersebut.

2. Kajian Pustaka

Manajemen yang efektif dan efisien tidak hanya diterapkan di sektor privat/swasta (perusahaan) tetapi juga diterapkan di sektor publik (Pemerintah/Negara) khususnya di bidang keuangan negara. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU No.1/2004) tentang perbendaharaan negara menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah negara untuk menentukan tujuan negara menimbulkan hak dan kewajiban negara yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.

Goal Setting Theory

Goal Setting Theory (teori penetapan tujuan) dipelopori oleh Locke (1968), menyatakan bahwa faktor penentu yang penting bagi individu terhadap bagaimana individu tersebut mengerahkan usaha/upayanya adalah terletak pada tujuan individu itu sendiri dan sejauh mana tanggung jawab terhadap tujuan tersebut. Konsep Goal Setting Theory adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan akan mempengaruhi perilaku kerjanya, sehingga pemahaman yang baik terhadap tujuan yang tercantum di dalam anggaran akan mempengaruhi kualitas hasil pekerjaannya.

Anggaran Sektor Publik

Menurut (Halim, 2017) mendefinisikan anggaran sebagai suatu pernyataan yang memfokuskan/merincikan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai oleh entitas dengan periode tertentu dan dapat diukur dengan ukuran finansial. Pada sektor publik anggaran adalah sebagai pencairan atau realisasi anggaran sesuai yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada periode tertentu yang sudah ditentukan (Trisna, dkk 2019).

Pelaksanaan Anggaran Di Indonesia

Pelaksanaan anggaran di Indonesia dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Undang-Undang No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang. APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Setelah ditetapkan dengan undang-undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Keputusan Presiden (Keppres).

Perencanaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah sebuah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat atau sesuai, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. (N. Sudarwati, 2017) menemukan bahwa perencanaan yang kurang baik dengan tidak menyusun skala prioritas perencanaan kegiatan akan menyebabkan penumpukan penyerapan anggaran. Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Pengadaan Barang dan Jasa

Peraturan presiden No 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa, pasal 1 ayat 1 yang dimaksud pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh barang / jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Peraturan presiden NO 54 tahun 2010 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada kualitas dan pelayanan publik.

Sumber Daya Manusia(SDM)

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan yang sudah dimiliki seseorang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara langsung kinerja yang dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik (Sudiarti, 2020). Tujuan pengelolaan sumber daya manusia mengarah pada pembangunan Pendidikan yang bermutu, membentuk SDM yang berkompeten, handal, produktif, kreatif dan berprestasi (Nuraeni, 2019). Menurut (Sudasri, 2016) menjelaskan bahwa manusia adalah aktor utama dalam sebuah organisasi yang memiliki beberapa karakteristik seperti kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman.

Internal

Faktor internal adalah suatu yang dapat mempengaruhi terjadinya penumpukan Pencairan Dana APBN. Faktor internal tersebut dapat berupa berbagai macam bentuk, bisa dari peralatan, dan juga bisa pengaruh dari pimpinan .

Penumpukan Pencairan Dana APBN

Anggaran belanja dapat mendorong roda perekonomian Indonesia jika penyerapan anggaran dilakukan secara maksimal. Kegagalan penyerapan anggaran dapat mengakibatkan hilangnya manfaat belanja, karena dana yang dialokasikan akan hilang manfaatnya, sehingga terjadi dana yang menganggur, tidak ada dana yang menganggur. Pola penyerapan anggaran cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran juga dapat mengurangi fungsi APBN tersebut. Penyerapan adalah realisasi anggaran yang terjadi (Halim, 2017).

3. Metode Penelitian

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda melalui program SPSS yang dilakukan secara serentak terhadap kelima variabel independen. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yang di ambil dari responden satuan kerja Lembaga/ kementerian yang berada di ruang lingkup pembayaran KPPN Bandar Lampung dan data sekunder berupa dokumen realisasi anggaran satuan kerja yang berada di ruang lingkup pembayaran KPPN Bandar lampung.

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Satuan Kerja Kementerian/Lembaga di wilayah kerja KPPN Bandar Lampung yang berkaitan dengan proses pencairan dana APBN. Berdasarkan data KPPN Bandar Lampung, jumlah satuan kerja yang ada sebanyak 283 yang terbagi di berbagai wilayah. (Sugiyono, 2016) berpendapat bahwa jumlah ukuran sampel tergantung dari tingkat ketelitian yang dikehendaki yang berkaitan dengan sumber dana, waktu, dan tenaga yang tersedia. Kendala besar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jarak satuan kerja yang tersebar, serta kurangnya waktu dan tenaga yang tersedia, sehingga peneliti memilih untuk menggunakan Teknik *random sampling* menggunakan rumus slovin dengan batas kesalahan yang ditetapkan 10%, sehingga jumlah sampel

pada penelitian ini dapat dibulatkan menjadi 74 satuan kerja(74 responden) dengan setiap satuan kerja mengisi 1 koesioner yang ditunjukkan kepada pejabat yang terlibat dalam proses pencairan dana.

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Validitas

Untuk r_{tabel} penelitian ini adalah 0,2887, maka dapat disimpulkan bahwa nilai r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} jadi masing-masing indikator untuk variabel Perencanaan Anggaran (X_1), Pelaksanaan Anggaran (X_2), Pengadaan Barang/Jasa (X_3), Sumber Daya Manusia (X_4), Faktor Internal (X_5) dan Kualitas Laporan Keuangan (Y) adalah valid dan dapat digunakan sebagai data penelitian.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas Diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki cronbach's alpha > 0.60 . Dengan demikian variabel (upah, lingkungan kerja dan kinerja karyawan) dapat dikatakan reliable.

Uji Asumsi Klasik

Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas Dengan Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		74
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.80806737
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.075
	Negative	-.095
Test Statistic		.095
Asymp. Sig. (2-tailed)		.095c

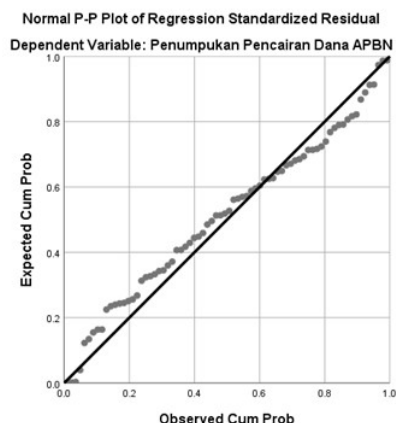
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Data Diolah 2023

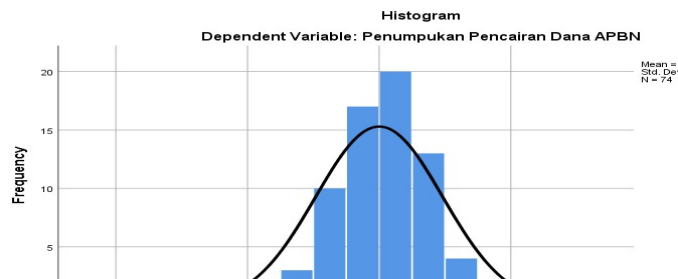
Berdasarkan pada tabel 2 uji normalitas dengan *Kolmogorov-Smirnov Test* dapat diperoleh sebesar 0,95 dengan nilai Sig 0,95 atau Sig 0,095 > 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Analisa lebih lanjut dengan menggunakan Histogram dan Normal Probability Plot of Regression Standardized residual sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah 2023

Gambar 1. Uji Normalitas Probability

Berdasarkan gambar 1 menunjukkan bahwa data pada grafik probability plot data menyebar dekat dari garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.



Sumber : Data Diolah 2023

Gambar 2. Uji Normalitas Dengan Histogram

Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa uji normalitas dengan histogram distribusi data membentuk lonceng (bell shaped) atau tidak melenceng ke kanan atau ke kiri, jadi dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

**Tabel 3 Uji Multikolinearitas
Coefficients^a**

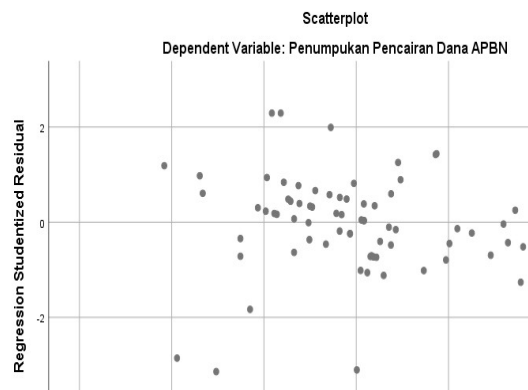
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Perencanaan Anggaran	.673	1.486
Pelaksanaan Anggaran	.969	1.032
Pengadaan barang/Jasa	.947	1.057
Sumber Daya Manusia	.621	1.610
Internal	.880	1.137

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN

Sumber : Data Diolah 2023

Berdasarkan tabel 3 dapat disimpulkan bahwa semua nilai VIF < 10 dan semua nilai tolerance > 0,10 maka penelitian ini dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data diolah 2023

Gambar 3. Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar 3 dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Diperoleh dari hasil pengolahan dengan menggunakan SPSS maka diperoleh regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 13,970 - 0,232X_1 - 0,162X_2 + 0,272X_3 - 0,012X_4 + 0,161e$$

Uji Hipotesis

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4 Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	154.918	5	30.984	3.660	.005 ^b
Residual	575.623	68	8.465		
Total	730.541	73			

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN

b. Predictors: (Constant), Internal, Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia

Sumber: Data Diolah 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai F diperoleh sebesar 3,660 dengan tingkat signifikansi 0,005. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengadaan barang/jasa, sumber daya manusia dan internal terhadap penumpukan pencairan dana APBN berpengaruh secara simultan.

Uji Parsial (Uji t)

Tabel 5 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.970	5.067		2.757	.007
	Perencanaan Anggaran	-.232	.254	-.120	-.913	.364
	Pelaksanaan Anggaran	.162	.080	.223	2.042	.045
	Pengadaan Barang/Jasa	.272	.090	.335	3.028	.003
	Sumber Daya Manusia	-.012	.230	-.007	-.051	.959
	Internal	.161	.189	.098	.855	.396

a. Dependent Variable: Penumpukan Pencairan Dana APBN

Sumber: Data Diolah 2023

Hasil Uji Hipotesis secara parsial Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,364. Nilai signifikansi tersebut diatas 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a1} ditolak dan H_{01} diterima. Hasil Uji Hipotesis Kedua secara parsial Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,045. Nilai signifikansi tersebut dibawah 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a2} diterima dan H_{02} ditolak. Hasil Uji Hipotesis Ketiga secara parsial Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh signifikan terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut diatas 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a3} diterima dan H_{03} ditolak. Hasil Uji Hipotesis Keempat secara parsial Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,959. Nilai

signifikansi tersebut diatas 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a4} ditolak dan H_{04} diterima. Uji Hipotesis Kelima secara parsial Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN, hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,396. Nilai signifikansi tersebut diatas 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H_{a4} ditolak dan H_{04} diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.460 ^a	.212	.154	2.909

a. Predictors: (Constant), Internal, Pelaksanaan Anggaran, Perencanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia.

Sumber: Data Diolah 2023

Hasil pengujian menunjukkan besarnya koefisien korelasi berganda (R), koefisien determinasi (R Square), dan koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*). Berdasarkan tabel *model summary*^b diatas diperoleh bahwa nilai koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,460 Ini menunjukkan bahwa variabel Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia, dan Faktor Internal terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun Anggaran mempunyai hubungan tidak cukup kuat . Hasil pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,212 dan nilai koefisien determinasi yang disesuaikan (*Adjusted R Square*) adalah 0,154. Hal ini berarti 15,4% variasi dari Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir tahun Anggaran bisa dijelaskan oleh variasi variabel independen (Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia, dan Internal). Sedangkan sisanya ($100\% - 15,4\% = 84,6\%$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini.

Pembahasan

1. Perencanaan Anggaran terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara persal didapat nilai perencanaan anggaran $t_{hitung} -0,913 < t_{tabel} 1,995$ dan nilai p-value (sig.) sebesar 0,364 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05 maka H_1 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa perencanaan anggaran tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran KPPN bandar Lampung. Perencanaan anggaran adalah kegiatan perencanaan kas yang akurat, yang akan memberikan dampak prediksi daya serap anggaran. Pentingnya perencanaan anggaran berbasis kinerja terkait dengan bagaimana setiap satuan kerja menentukan target secara efektif dan efisien sehingga program kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai dengan target.

2. Pelaksanaan anggaran terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara persal didapat nilai perencanaan anggaran $t_{hitung} 2,042 > t_{tabel} 1,995$ dan nilai p-value (sig.) sebesar 0,045 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05 ($0,045 > 0,05$) maka H_2 diterima. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran KPPN Bandar Lampung. Pelaksanaan anggaran merupakan tahap di mana sumber daya digunakan untuk melaksanakan kebijakan anggaran. Suatu hal yang mungkin terjadi dimana anggaran yang disusun dengan baik ternyata tidak dilaksanakan dengan tepat, tetapi tidak mungkin anggaran yang tidak disusun dengan baik dapat diterapkan secara tepat, cepat dan efisien.

3. Pengadaan barang/jasa terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara persal didapat nilai pengadaan barang/jasa $t_{hitung} 3,028 > t_{tabel} 1,995$ dan nilai p-value (sig.) sebesar 0,003 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05 ($0,03 < 0,05$) maka H_3 diterima. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran KPPN Bandar Lampung. Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari satuan kerja dari suatu organisasi sektor publik yang memiliki tujuan melayani masyarakat. Oleh sebab itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah harus memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik berdasarkan sistematis. Pengadaan barang dan jasa merupakan variabel yang akan mengukur sejauh mana permasalahan pengadaan barang dan jasa menjadi penyebab keterlambatan penyerapan anggaran. Hasil perhitungan terhadap hipotesis menunjukan bukti bahwa pengadaan barang dan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin baik pola pengadaan barang dan jasa satuan kerja di KPPN Bandar Lampung akan dapat berpengaruh kepada semakin baiknya pola penyerapan anggaran satuan kerja yang bersangkutan.

4. Sumber daya manusia terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara persal didapat nilai perencanaan anggaran $t_{hitung} -0,051 < t_{tabel} 1,995$ dan nilai p-value (sig.) sebesar 0,959 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05 ($0,959 > 0,05$) maka H_4 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran KPPN bandar Lampung. Sumber daya manusia merupakan faktor yang diukur dari kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh masing-masing satuan kerja dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan sehingga mampu menghadapi perubahan, terutama dalam proses penyerapan Anggaran APBN. Hasil perhitungan terhadap hipotesis menunjukkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN. Hal ini berarti bahwa penempatan pegawai sesuai kemampuan, latar belakang pendidikan pegawai, serta pelatihan dan pendidikan bagi para pegawai memberikan dampak yang baik bagi pelaksanaan penyerapan anggaran sehingga dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terukur serta tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.

5. Internal terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran.

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel diatas maka secara persal didapat nilai internal $t_{hitung} 0,855 < t_{tabel} 1,995$ dan nilai p-value (sig.) sebesar 0,396 lebih besar dari nilai α yaitu 0,05 ($0,396 > 0,05$) maka H_5 ditolak. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa internal tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penumpukan pencairan dana APBN di akhir tahun anggaran KPPN bandar Lampung. Perusahaan swasta maupun pemerintah harus selalu memperhatikan berbagai faktor baik yang berasal dari dalam perusahaan maupun faktor-faktor yang berasal dari luar perusahaan. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Berbagai faktor tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan keseluruhan. Baik buruknya internal satker akan mempengaruhi pencapaian sebuah tujuan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris Faktor-faktor Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia, Internal terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN pada kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.
2. Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.
3. Pengadaan Barang/Jasa berpengaruh terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.
4. Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.
5. Faktor Internal tidak berpengaruh terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bandar Lampung.

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Pengadaan Barang/Jasa, Sumber Daya Manusia, dan Internal secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap Penumpukan Pencairan Dana APBN di Akhir Tahun Anggaran Lingkup Pembayaran KPPN Bandar Lampung.

Daftar Pustaka

- Halim, A. (2017). *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Jakarta : Salamba Empat.
- Harahap, S. A. S., Taufik, T., & Nurazlina. (2020). Pengaruh perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, Pencatatan administrasi dan Kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran (studi empiris pada OPD Kota Dumai). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 1–10.
- Kenamon, M., & Sara, D. E. Y. (2021). Analisis faktor-faktor yang menyebabkan penumpukan pencairan dana APBN pada akhir tahun anggaran di KPPN Baturaja. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2).
- Nuraeni. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Lembaga Pendidikan. *Jurnal Idaarah*, Vol III No.
- Puluala, M. G. (2021). *Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Dan Pengadaan Barang Dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga)*. 1(1), 1–9.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dana, Rencana Penerimaan Dana, dan Perencanaan Kas.
- Sudasri, D. (2016). “Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran,,” *Fakultas Ekonomi*, pp,1-22.
- Sudiarti, N. W. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Locus of Control Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*.
- Sugiyono. (2016). *Cetakan Ke-23. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Trisna, Trisna; Marto, H. S. S. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Di Wilayah Pembayaran KPPN Tolitoli Tahun Anggaran 2019. *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian*, 1(2), 124–129.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.